Transformasi NGO di Era Digital : Cerita Kunjungan Studi ke Kemitraan dan Bina Swadaya

Muhammad Zuhdan, S.IP,M.A
Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Amikom Yogyakarta

Awal Cerita Dibalik Kunjungan Studi

Perjalanan kami diawali oleh satu pertanyaan ke saya, apa itu NGO (Non-Governmental Organization) ? Pertanyaan itu dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Amikom Yogyakarta, Dr Ahmad Fauzi, M.M. Kemudian satu pertanyaan tersebut berlanjut dengan rasa penasaran atas keberadaan dan peran NGO di Indonesia. Penasaran itu lahir dari persepsi negatif publik tentang NGO yang diidentikan dengan kelompok yang suka memeras pejabat pemerintah ataupun kelompok yang suka koar-koar di televisi ataupun berdemontrasi di jalan membawa massa banyak. Persepsi negatif tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang ada orang-orang ataupun kelompok yang mengatasnamakan NGOorang sering menyebutnya dengan kata LSM-melakukan tindakan-tindakan serupa. Bisa jadi itu bagian salah satu repertoar gerakannya, atau memang orang-orang tersebut juga sebenarnya menyalahgunakan kerja-kerja otentik sebuah NGO.

Pertanyaan tentang NGO yang dilontarkan oleh Warek III tersebut kemudian menjadi diskusi di kalangan para pimpinan kampus, dua orang diantaranya yaitu Direktur Bussines Placement Center (BPC) dan alumni, Kusnawi, S.Kom,M.Eg dan Dekan Fakultas Ekonomi & Sosial, Emha Taufiq Lutfi, S.T,M.Kom. Awalnya saya yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut karena memang latar belakang saya bekerja di NGO cukup lama, baik lokal, nasional, maupun internasional. Tentu saja, jawaban saya tidak mencukupi untuk memberikan gambaran yang lebih detail dan menyeluruh tentang NGO. Lalu tindak lanjut dari diskusi tersebut muncul ide kunjungan studi ke NGO-NGO besar di Jakarta. Ada dua NGO besar yang kami kunjungi, yaitu Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dan Bina Swadaya.

Kemudian, Warek III dan Dekan Fakultas Ekonomi Sosial (FES) Universitas Amikom Yogyakarta, meminta semua Ketua Program Studi (Kaprodi) FES untuk ikut serta berkunjung ke kedua NGO tersebut. Alasan utamanya, menurut data hasil tracer study yang dilakukan oleh Direktorat BPC dan Alumni, ada persentase yang cukup signifikan ketertarikan alumni bekerja di sektor NGO tetapi pengelola kampus minim informasi terkait NGO. Mainstream sektor pekerjaan yang selama ini dalam kaca mata para pengelola kampus, lebih banyak di korporasi dan pemerintahan mengingat memang latar belakang dan core study kampus kami di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jadi identik pekerjaan nantinya di sektor bisnis/korporasi. Mengingat sejak 2017 kemarin, Universitas Amikom Yogyakarta membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Sosial dan Fakultas Sains dan Teknologi sehingga kunjungan ke NGO menjadi penting untuk memperkaya materi pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Kampus Merdeka .

Kemitraan (Partnership For Governance Reform) : Think Thank Kebijakan Pemerintah

Kemitraan, salah satu NGO besar di Indonesia. Awalnya dulu bernama United Nation Development Program (UNDP) dibawah kantor pusat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS. Tetapi kemudian melepaskan diri dan menjadi lembaga independen bernama Kemitraan atau orang juga sering menyebutnya dengan Partnership for Governance Reform. Sesuai dengan namanya, kerja Kemitraan adalah mengkonsolidasikan NGO-NGO nasional

maupun lokal untuk mengawal Agenda Reformasi 1998 di sektor pemerintahan, sampai sekarang pun masih. Dibalik itu sebenarnya mereka juga menjadi think thank kebijakan pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya juga bergerak di isu lingkungan. Hal yang menarik dari Kemitraan ini di era digital, bahwa semua pekerjaan dan cash flow anggaran kerja mereka terdisplay secara real time di dashboard digital lobby kantornya maupun di sistem informasi manajemen mereka, sehingga monitor pekerjaan dan anggaran untuk

beragam proyek mereka lebih mudah dan transparan. Senin 4 September 2023 kunjungan kami di kantor tersebut, disambut hangat oleh Laode M Syarif Direktur Kemitraan/Komisioner KPK 2015-2019 beserta jajaran pimpinan Kemitraan lainnya.

Bina Swadaya : Menerapkan Sociopreunership Untuk Ribuan Petani dan UKM

Saat datang di area usaha dan perkantoran Bina Swadaya di daerah Mekarsari, Depok, Jawa Barat kami ngopi dulu di Kafe Nusantara yang terletak di ujung pintu gerbang area tersebut. Ternyata tidak tahunya kafe tersebut salah satu unit usaha dari Bina Swadaya. Waktu jadwal pertemuan kami dengan para direktur dan sekretariat lembaga tersebut, yaitu Selasa 5 September 2023 jam 10.30. Menariknya saat menunggu jadwal on schedule, mereka sedang membuat konten digital untuk menebar pemikiran Pak Bambang Ismawan tentang

Sociopreunership. Kebetulan Pak Bambang Ismawan tersebut adalah pendiri Bina Swadaya sekaligus dikenal juga sebagai Bapak Sociopreunership Indonesia. Hal menarik dari Bina Swadaya di era digital, mere-ka mengembangkan ide bisnis sosialnya dengan beragam platform digital, misalnya : Trubus Channel (Youtube), @majalahtrubus (TikTok dan Instagram), kelastrubus.id (Ke-las Agripreuner), trubus.id (portal informasi), dan Majalah Trubus Digital (Playstore).

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Oleh-oleh Penting Buat Karir Anak Muda/Mahasiswa

NGO yang selama ini masih awam kiranya akan menjadi sebuah sektor baru yang prospektif untuk digeluti sebagai sektor kerja baru. NGO salah satu sektor pekerjaan yang mengambil jalan sunyi dari popularitas tapi memberikan kontribusi nyata dan luas untuk perubahan sosial maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut kami dapat saat berkunjung studi di Kemitraan dan Bina Swadaya. Tetapi bekerja di NGO bukan tanpa kompetensi, bahkan membutuhkan kompetensi yang tinggi sesuai bidang ilmu masing-masing mengingat kerja NGO bukan hanya teknis saja tapi juga think thank kebijakan di berbagai sektor. Di era digital, NGO juga beradaptasi secara cepat sehinga kompetensi digital menjadi penting untuk dimiliki oleh mahasiswa/ yang tertarik berkarir di NGO. Begitulah sedikit oleh-oleh yang bisa kami bagi untuk selebihnya bisa ngopi sambil berdiskusi lebih lanjut.

Ketegangan . . . . . Sambungan hal 1

Perimbangan kekuasaan menjadi timpang tanpa ada resistensi berarti di legislatif sehingga menjadi sebab lolosnya RUU kontroversial seperti *Omnibus Law.*

Pilpres telah menjadi arena di mana semua pertaruhan, kepentingan, dan harapan semua aktor politik dicurahkan, yang menjadikannya menjadi semacam ëbejanaí yang demikian tinggi tekanannya. Tekanan tinggi itulah yang membuat pilpres di Indonesia dirasa penuh ketegangan. Dalam *political ambience* yang dipenuhi ketegangan itulah kejutan demi kejutan muncul.

Sikap dan dukungan presiden terutama kepada Ganjar dan Prabowo memunculkan beragam spekulasi dan pertanyaan dari partai dan masyarakat. Belum lama lalu, bongkar pasang pemain juga terjadi dalam koalisi yang sebetulnya bukan sesuatu yang aneh dalam iklim politik di Indonesia yang lebih berbasis kepentingan, bukan pada kesamaan posisi dalam spektrum ideologi. Drama-drama itulah yang membuat pilpres menjadi semakin menegangkan.

Karena itulah menarik untuk membincangkan wacana yang ditawarkan KPU RI untuk mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024. KPU bermaksud memperpendek durasi pendaftaran capres-cawapres, yang awalnya dijadwalkan pada 19 Oktoberñ25 November 2023 menjadi 10 Oktober 2023 dan ditutup pada 16 Oktober 2023.†Artinya durasi pendaftaran diperpendek dari awalnya 38 hari menjadi tujuh hari saja.

Pemerintah dan beberapa anggota DPR nampaknya sepakat dengan usulan KPU ini. Menkopolhukam Mahfud MD misalnya, mengatakan bahwa masa pendaftaran yang sebelumnya terlalu lama, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan antar partai dalam penentuan calon yang akan maju. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyampaikan bahwa usulan pendaftaran capres dan cawapres dapat membantu meredakan ketegangan politik khususnya di antara partai-partai pengusung.

Meskipun demikian, sebetulnya usaha-usaha meredakan ketegangan pilpres tidak hanya cukup diupayakan melalui aspek regulasi. Upaya-upaya kultural juga perlu dikedepankan agar pilpres menjadi momentum pendidikan politik yang lebih santai, namun tetap santun mencerdaskan dan dapat dinikmati semua anak bangsa. Pelembagaan partai juga menjadi salah satu upaya agar kontestasi pilpres tidak sarat kepentingan pribadi, namun berbasis pada kepentingan yang lebih luas.

Pilpres sebenarnya tidak hanya cukup dimaknai sebagai metode untuk memilih pemimpin politik (Schumpeter, 1950). Namun pilpres maupun pemilu yang lain merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap keberlangsungan negara-bangsa. Di mana hal itu sedikit banyak ditentukan oleh bagaimana tindakan aktor-aktor politik hari ini.

(*Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan UMY)-f*

Sejumlah . . . . . Sambungan hal 1

Kapanewon Temon ada di Kalurahan Kulur, Kaligintung, Temon Wetan, Temon Kulon, Palihan, Janten, Karangwuluh, Sindutan, dan Kebonrejo.

Bidang lahan yang tidak diketahui pemiliknya tersebut akan diumumkan kepada publik. "Apabila setelah proses itu masih ditemukan ada lahan yang belum mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka konsultasi publik kemungkinan akan dilakukan kembali," ungkapnya.

Menurut Bayu, apabila tahap konsultasi publik belum tuntas, Pemda DIY tidak bisa menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk melakukan pembebasan lahan. Untuk itu Pemda DIY perlu mendapat pernyataan persetujuan pelepasan lahan dari warga terdampak proyek tol.

"Untuk IPL prosesnya belum selesai, nanti kalau semua sudah setuju dan tidak ada yang menyatakan keberatan baru kita ajukan IPL," jelasnya. **(Ria)-f**

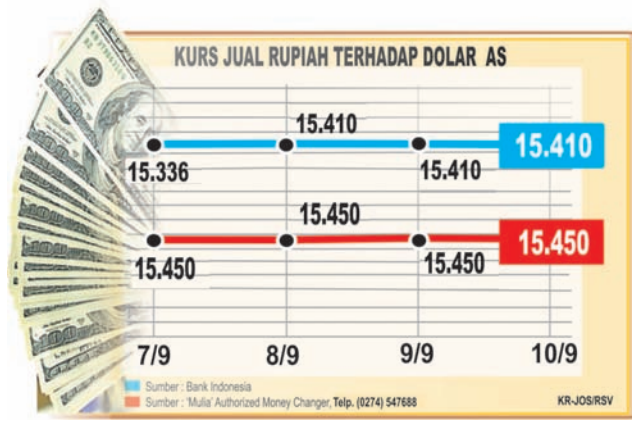

Prakiraan Cuaca Senin, 11 September 2023

Lokasi	Cuaca Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko